**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA
DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2022
(Studi di Desa Compang Kules Kecamatan Kuwus Barat
Kabupaten Manggarai Barat)**

Maria Priyanti Ganggur

Email: putryganggur@gmail.com

Drs. Miftahol Horri, M.SI AK; CA

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

ABSTRAK

Akuntabilitas merupakan suatu pertanggungjawaban pemerintah untuk melaporkan dan menyajikan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban tersebut dilakukan agar pemerintah dapat transparan dengan komitmen yang telah terbentuk dalam pelaksanaannya. Pemerintah desa Compang Kules, kecamatan Kuwus Barat, kabupaten Manggarai Barat adalah pemerintah desa yang mendukung adanya *Good Governance* khususnya akuntabilitas dan Pengelolaan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Compang Kules Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis dengan kata-kata yang melatarbelakangi responden berperilaku seperti itu, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan, dan diverifikasi.. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa yang diterapkan oleh pemerintah desa Compang Kules sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah desa Compang Kules menggunakan media informasi, terdapat informasi yang disebar tiap-tiap dusun melalui ketua RT dan Ketua Dusun, selain itu juga terdapat papan informasi yang ditempatkan di Kantor Desa. Meskipun pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa sangat baik, tetapi pemahaman masyarakat mengenai kebijakan Alokasi Dana Desa masih rendah.

Kata Kunci: Dana Desa; Akuntabilitas; Pengelolaan; Pemerintah Desa.

ABSTRACT

Accountability is the government's responsibility to report and present the activities that have been carried out to the public. This accountability is carried out so that the government can be transparent with the commitments that have been formed in its implementation. The Compang Kules village government, Kuwus West sub-district, West Manggarai district is a village government that supports good governance, especially accountability and management. This study aims to assess the accountability of Village Fund Allocation Management (ADD) in Compang Kules Village, West Kuwus District, West Manggarai. This study uses a qualitative approach with descriptive analysis. that descriptive qualitative research is to describe the opinion of the respondent as it is in accordance with the research question, then analyzed with the words behind the respondent's behavior, reduced, triangulated, key, and research. The results of this study indicate that the management of the Village Fund Allocation implemented by the Compang Kules village government is in accordance with the provisions of the legislation and

applicable regulations. The management carried out by the Compang Kules village government uses information media, there is information that is distributed to each hamlet through the head of the RT and the head of the hamlet, in addition there is also an information board placed at the Village Office. Although the management of the Village Fund carried out by the village government is very good, the community's understanding of the Village Fund Allocation policy is still low.

Keywords: Village Fund; Accountability; Management; Village Government.

I. LATAR BELAKANG

Pembangunan desa akan semakin menantang dimasa depan dengan kondisi perekonomian daerah yang semakin terbuka dan kehidupan berpolitik yang lebih demokratis. Akan tetapi desa sampai saat ini masih dipandang sebelah mata dalam hal ekonomi atau yang lainnya. Padahal perlu kita ketahui sebagian besar penduduk Indonesia berdiam di daerah pedesaan dan berprofesi sebagai petani dan nelayan. Oleh karena itu sudah sewajarnya bila pembangunan pedesaan harus menjadi prioritas utama dalam segenap rencana strategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia (Hernowo,2004).

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan dari Dana Desa antara lain:

1. Meningkatkan pelayanan publik di Desa.
2. Menuntaskan kemiskinan.
3. Memajukan perekonomian Desa.
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan.
5. Memperkuat masyarakat dana sebagai subjek pembangunan

Melihat tujuan dana desa yang begitu pentingnya bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat, sangat memperhatikan bahwa ternyata tujuan dari diturunkannya dana desa belum sampai pada tahapan dan aturan yang benar.

Selain dari kurang maksimalnya pengalokasian dana desa tersebut yang harusnya sesuai dengan tujuan Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini disebabkan karena minimnya sumber daya yang ada dan kontrol dari pemerintah dan masyarakat yang kurang terhadap kinerja kepala desa dalam mengelola dana desa tersebut. Oleh karena itu perlu diketahui sejauh mana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan sejauh mana peran dari Alokasi Dana Desa dalam program desa sehingga tujuan pemerintah mengalokasikan dana desa dapat terealisasikan dengan baik khususnya dibidang keuangan (finansial).

Dari hasil observasi yang dilakukan, terlihat bahwa Akuntabilitas dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Compang Kules Kecamatan Kuwus Barat Kabupaten Manggarai Barat. Dalam penelitian ini penulis meneliti di wilayah Kecamatan Kuwus Barat khususnya di Desa Compang Kules karena di wilayah ini mempunyai banyak potensi baik. potensi perairan, pertanian, pasar, peternakan dan perikanan. Dengan banyaknya potensi yang dimiliki maka penulis tertarik untuk meneliti pengelolaan ADD di Desa Compang Kules, dampak dari adanya implementasi ADD untuk sektor pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan

Berdasarkan permasalahan yang dialami Desa Compang Kules Kecamatan Kuwus Barat Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana telah diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Compang Kules Kecamatan Kuwus Barat Tahun 2022”.

II. LANDASAN TEORI

Akuntabilitas

Istilah akuntabilitas berasal dari Bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggung jawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawabkan. Secara umum definisi akuntabilitas adalah sebagai kewajiban-kewajiban dari pihak yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengan kegiatan untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung jawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat sebagai suatu proses pemberian pertanggungjawaban dan memberi jawaban.

Pemerintahan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa pasal 1: “Desa adalah dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat dalam sistem pemerintahan Negeri Kesatuan Republik Indonesia.” Sehingga masyarakat desa disebut sebagai masyarakat yang mengatur dirinya sendiri serta membangun pemerintahan desa yang mengatur diri sendiri. Dalam hal ini perlu diperhatikan, desa merupakan sebuah tatanan pemerintahan yang kecil di setiap daerah yang telah ada bahkan sebelum Indonesia ini terbentuk sebagai sebuah negara berdaulat. Reformasi ini berbasis mendorong otonomi daerah bersifat hakiki. Tujuannya untuk menciptakan pemerintahan desa yang mampu mensejahterakan rakyat tataran bawah. Penyelenggaraan Pemerintah Desa merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, Kepala Desa bertanggung jawab di dalam UU No. 6 Tahun 2014 pasal 1 menyebutkan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat.

Konsep Dana Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah mengalokasikan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.

Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa “Pengelolaan Keuangan Desa

merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas keuangan desa.

Asas Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Keuangan desa dikelola dengan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, keuangan desa yang dikelola dalam jangka 1 tahun anggaran yakni 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Kesejahteraan Masyarakat

Konsep kesejahteraan tidak dapat dipisahkan dari kualitas hidup masyarakat. Dalam dunia modern konsep kesejahteraan adalah kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih, kesempatan untuk melanjutkan Pendidikan, dan memiliki pekerjaan yang memadai, yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga negara.

III. METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian observasi. Oleh karena itu, maka peneliti menetapkan lokasi penelitian di Desa Compang Kules Kecamatan Kuwus Barat Kabupaten Manggarai Barat.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang di gunakan dalam penelitian adalah menggunakan studi kasus dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif, karena mengungkapkan fenomena-fenomena atau masalah-masalah berlandaskan atas logika keilmuan. Menurut Mukhtar (2013:29) penelitian deskriptif dan kualitatif adalah sebuah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan sebuah empiris secara objektif ilmiah dengan berlandaskan pada logika keilmuan, prosedur, dan didukung oleh metodologi dan teoritis yang kuat sesuai dengan disiplin keilmuannya yang di tekuni. Data dalam penelitian kualitatif terbagi atas dua yaitu primer dan data skunder. Rencana penelitian ini menyajikan analisis terhadap fenomena melalui kata-kata, bukan angka-angka. Rencana penelitian merupakan gambaran dari fakta yang ditemukan di lapangan yang akan di olah secara lebih dalam serta terperinci.

Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian ini yang di gunakan dalam penelitian adalah menggunakan studi kasus dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif, karena mengungkapkan fenomena-fenomena atau masalah-masalah berlandaskan atas logika keilmuan. Menurut Wiyono (2011:1135). "Studi kasus adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dibutuhkan dengan cara menarik sampel dari unit sampel tertentu yang berhubungan dan dipelajari secara lebih mendalam."

Sumber Data

Sumber data merupakan suatu fakta atau keterangan dari obyek diteliti, sumber data yang digunakan berasal dari yaitu :

1. Data primer dengan data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Menurut (Moleong, 2017, hlm. 157-158). Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi. Sumber data ini langsung memberikan data kepada pengumpul data.
2. Data sekunder
Data sekunder dengan mengambil data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

Teknik Pengambilan Data

Wawancara.

Tekhnik wawancara sangat tepat untuk melengkapi data yang bersumber dari narasumber atau informan. Yang dalam penelitian kualitatif khususnya dilakukan dalam bentuk wawancara mendalam dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber.

Observasi (pengamatan)

Observasi Merupakan tehnik pengumpulan data dari sumber data yang berupa tulisan, angka, gambar atau grafik serta rekaman gambar yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap obyek penelitian dengan menggunakan alat indera pendengaran dan penglihatan terhadap fenomena sosial yang terjadi di lokasi penelitian.

Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lainlain. Menurut Sugiyono (2013:240).

Teknik Analisa Data

Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan menggambarkan dan membandingkan objek yang sudah diteliti dengan menganalisa dan mengevaluasi data tersebut berdasarkan teori-teori yang sudah diperoleh, sehingga dapat ditarik kesimpulan dan disajikan dalam bentuk penelitian berdasarkan tata cara ilmiah.

1. Inventarisasi masalah terkait Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
2. Membandingkan masalah yang ada dengan teori yang benar

Masalah penelitian bisa dikenali berdasarkan penelaahan terhadap berbagai teori. Teori itu sendiri selain menjadi acuan dalam pengenalan masalah juga menjadi acuan dalam perumusan hipotesis.

3. Menarik Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan cara membandingkan uraian yang telah dirumuskan dengan hasil analisis data yang telah diperoleh.

4. Memberi Solusi

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dilakukan dengan kesimpulan yang ada peneliti memberi solusi diharapkan dalam pengelolaan keuangan agar masyarakat mengetahui penggunaan alokasi dana desa dan untuk masyarakat agar lebih aktif dalam pengawasan pengelolaan alokasi dana desa

Teknik Keabsahan Data

Untuk menjamin validitas data yang diperoleh dalam penelitian dilakukan dengan tehnik triangulasi data yaitu tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Tehnik ini untuk keperluan atau sebagai pembanding. Pada penelitian ini tehnik triangulasi data dilakukan dengan membandingkan yang sama atau pada informan yang berbeda, artinya apa yang diperoleh dari sumber satu, bisa lebih teruji kebenarannya jika dibandingkan dengan data sejenis yang diperoleh dari sumber lain yang berbeda sehingga keakuratan data dapat dipertanggung jawabkan.

Identifikasi variabel dan pengukurannya

Tabel 1: Variabel Penelitian

No	Variabel	Defenisi	pengukurannya	Skala
1.	Rasio likuiditas	Rasio likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu	<p>Current Ratio =</p> $\frac{\text{aktiva lancar}}{\text{hutan lancar}}$ <p>Quick Ratio =</p> $\frac{\text{Aktia Lanca} - \text{pesedian}}{\text{Hutang Lancar}}$	Rasio
2.	Rasio solvabilitas	Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang, artinya berapa besar beban untuk ditanggung perusahaan diandingkan dengan aktivanya.	<p>Debt to Asset Ratio =</p> $\frac{\text{Total hutang}}{\text{Total Aktiva}}$ <p>Debt to equity ratio =</p> $\frac{\text{Total hutang}}{\text{modal}}$	Rasio
3.	Rasio Rentabilitas	Rasio rentabilitas adalah rasio yang digunakan	Return On Asset =	Rasio

		untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.	$\frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total Aktiva}}$ Net Profit Margin = $\frac{\text{Laba bersih}}{\text{penjualan}}$	
4.	Rasio Aktivitas	Rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya	Total Asset Turnover = $\frac{\text{penjualan}}{\text{total akiva}}$ Iventory Turnover = $\frac{\text{penjualan}}{\text{persedian}}$	Rasio

3.1. Populasi Dan Sampel

Populasi dan Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan PT Sinar Rejeki Baru yang terletak di Jln. Kalijudan Madya 11 no 11. Laporan keuangan yang digunakan adalah laporan keuangan tahun 2019- 2022.

3.2. Jenis dan Sumber Data

1. *Jenis data* Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Data kuantitatif

Data Kuantitatif adalah data yang berupa angka atau bilangan. Data kuantitatif pada penelitian ini berupa laporan laba rugi dan neraca triwulan I, triwulan II, triwulan III, triwulan IV PT.Sinar Rejeki tahun 2019-2022

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan adalah data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari PT. Sinar Rejeki Baru berupa laporan keuangan .

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah proses dan cara yang di pergunakan penulis untuk mendapatkan data yang di butuhkan. Setiap penelitian baik itu penelitian kualitatif ataupun penelitian kuantitatif tentunya menggunakan teknik dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan. Tujuan dari hal ini ialah untuk membantu penulis memperoleh data-data yang otentik.

1. Pengamatan/Observasi

Pada penelitian ini, langkah awal teknik pengumpulan data dilakukan oleh penulis adalah observasi. Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu. Jadi dapat disimpulkan bahwa observasi

ialah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian sehingga dapat memperoleh gambaran secara jelas mengenai objek yang akan diteliti. Observasi dilakukan dalam penelitian ini dengan cara berkunjung atau datang langsung ke lokasi penelitian tempat penulis untuk meneliti.

2. Dokumentasi

Langkah kedua dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah pengumpulan data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan untuk mengetahui perubahan kinerja keuangan perusahaan sebelum dan saat covid-19, dilihat dari rasio-rasio keuangan, yaitu rasio likuiditas (current ratio, quick ratio), rasio solvabilitas (debt to total asset, debt to equity ratio), rasio rentabilitas (return on asset, Net Profit Margin), dan Rasio Aktivitas (*Total Asset Turnover, Inventory Turnover*)

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Gambaran Umum Desa Compang Kules

Desa Compang Kules merupakan desa yang terletak dengan luas sekitar 3,53 km dengan jumlah penduduk sebanyak 1.224 jiwa. Jarak desa Compang Kules dengan Kecamatan hanya 2 km dan jarak ke Kabupaten 25 km. Adapun Batasan geografisnya sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Pacar
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ndosso dan Kecamatan Kuwus
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Ruteng
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pacar.

Keadaan Sosial

Banyaknya kegiatan di Desa Compang Kules seperti Olahraga, Kelompok Tani, Kelompok Arisan merupakan kegiatan masyarakat desa yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan desa pada masyarakat.

Keadaan Ekonomi

Mayoritas mata pencarian penduduk Desa Compang Kules bergerak dibidang pertanian. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang memadai dengan perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Manggarai Barat. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil pemberian kredit sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di bidang perdagangan.

Tingkat angka kemiskinan Desa Compang Kules yang masih tinggi menjadikan Desa Compang Kules harus bisa mencari peluang lain yang bisa menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat. Kekayaan Sumber Daya Alam yang ada di Desa Compang Kules amat sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya. Selain itu letak geografis desa

yang cukup strategis dan jalur transportasi yang mempertemukan antara kampung dan kampung di Desa Compang Kules.

Prasaran Dan Sarana Desa

Pembangunan masyarakat desa diharapkan bersumber pada diri sendiri (kemandirian) dan perkembangan pembangunan harus berdampak pada sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa menjadi lebih baik.

1. Prasarana kesehatan
 - a. Polindes : 1 unit
 - b. Bidan Desa : 4 orang

2. Prasarana Pendidikan
 - a. PAUD :2 unit
 - b. SD :2 unit
 - c. SLTA / SMP :1unit
 - d. Lapangan Olahraga :1 unit

PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian mengenai Akuntabilitas pengelolaan alokasi Dana Desa di desa Compang Kules Kecamatan Kuwus Barat Kabupaten Manggarai Barat. Namun penelitian ini difokuskan ke proses pengelolaan alokasi Dana Desa dari tahap perencanaan, Pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif Kualitatif yang lebih mengendepankan analisis yang mendalam terhadap data yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan para informan yang secara langsung terlibat dalam proses pengelolaan alokasi Dana Desa di Desa Compang Kules Kecamatan Kuwus Barat Kabupaten Manggarai Barat.

Alokasi dana desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat Pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintahan Desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah Desa. Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan Kepada Desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan Desa sebagai salah satu lembaga yang adil dalam format pemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang - undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia sehingga dengan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut mampu meningkatkan Pembangunan Desa, Partisipasi

Masyarakat dalam Memberdayakan dan Mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan. Dana Desa menurut PP No. 60 Tahun 2014 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat

Menurut Pemdagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pemahaman

mengenai pengelolaan alokasi dana desa di desa menjadi aspek penting dan mendasar yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan di level pemerintahan desa, khususnya perangkat desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Keuangan desa.

Akuntabilitas Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Akuntabilitas sistem pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Seperti yang dikemukakan oleh Haryanto (2007) bahwa prinsip good governance adalah adanya partisipasi, transparansi dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan.

Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan ADD.

Dari ketentuan tersebut disebutkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya nanti dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan adanya komitmen dari para stakeholder/pengambil keputusan bahwa pengelolaan ADD itu harus memenuhi prinsip-prinsip good governance yang harus dilaksanakan oleh para pengelola ADD dan tentunya masyarakat desa. Adanya komitmen yang kuat dari kepala desa Compang Kules untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, sesuai dengan informasi salah seorang kepala desa sebagai berikut:

“Adapun komitmen dari kepala Desa dan Pemerintah Desa agar lebih mempercepat dinamika pembangunan yaitu dengan cara untuk menggali swadaya masyarakat. Artinya, pemerintah desa berupaya dengan jumlah ADD yang relatif kecil ini mengajak masyarakat ikut serta di dalam mempercepat pembangunan Desa.”

Dalam kaitan dengan komitmen kepala Desa untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat juga disampaikan oleh salah seorang anggota Tim Fasilitator Kecamatan:

“Pemerintahan Desa sangat berkomitmen dalam mendorong partisipasi masyarakat, masyarakat diharapkan membayar pajak tepat pada waktunya dikarenakan uang hasil pajak nantinya dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk ADD yang besarnya ditentukan oleh pemerintah kabupaten.”

Pendapat informan tersebut memberi sinyal bahwa dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat desa khususnya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua stakeholders dalam menyelesaikan semua permasalahan yang ada di desa. Pelaksanaan tersebut dalam rangka penerapan prinsip partisipatif pembangunan masyarakat desa yang didukung oleh prinsip-prinsip transparan, akuntabel dan responsif. Dilihat dari sisi partisipasi sudah sesuai dengan arti partisipasi menurut (Tjokroamidjojo, 2000) keterlibatan setiap warga negara di dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakilinya.

a. Akuntabilitas Perencanaan

Sebelum merencanakan Alokasi Dana Desa, terlebih dahulu dilakukan penentuan besaran ADD. Penentuan besarnya dana ADD yang akan diterima setiap desa di Kabupaten Manggarai Barat ditentukan berdasarkan penghitungan ADD Minimal dan ADD Proporsional. ADD Minimal merupakan dana yang dialokasikan untuk ADD yang dibagi secara merata kepada seluruh desa se-Kabupaten Manggarai Barat, sedangkan ADD Proporsional ditentukan berdasarkan nilai bobot desa yang ditentukan dan dirumuskan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten serta ditetapkan dalam Keputusan Bupati. Pada tahap perencanaan penggunaan ADD didahului dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat lainnya. Selanjutnya berdasarkan hasil Musrenbangdes, Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk dibahas bersama-sama dengan BPD. RPJMDes juga memuat Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) tahunan yang menjadi dasar bagi Kepala Desa dalam menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Rencana pengalokasian dana ADD wajib dituangkan dalam rancangan APBDDesa tahun berkenaan dan dicatat dalam pendapatandan belanja desa. ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang penggunaannya erintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu perencanaan program dan kegiatanny disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes tersebut merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negri Nomor 133 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Tahap pertama dalam pengelolaan keuangan desa adalah perencanaan. Secara umum perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah tersusunya RPJMDesa dan RKPDDesa yang menjadi dasar untuk menyusun APBDDesa yang merupakan perencanaan keuangan desa.

Perencanaan dengan model partisipatif dilakukan melalui musrembang desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari Lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan masyarakat desa. Musrembang desa tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan di desa. Sehingga rencana kegiatan yang tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang dihasilkan adalah gambaran dari harapan dan kebutuhan seluruh masyarakat setempat. Tingkat partisipasi masyarakat masih sangat rendah, kondisi tersebut ditunjukkan dengan sedikitnya jumlah masyarakat yang hadir maupun yang menyampaikan aspirasi/pendapat dalam musrembang yang telah dilaksanakan. MusrembangDesa adalah forum musyawarah yang membahas usulan usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat Desa serta transparansi pemerintah kepada

masyarakat. Pada Proses Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) diawali dengan rapat perdesun, Untuk menyusun rencana Kegiatan tersebut harus melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di Desa baik lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat umum melalui forum musyawarah tingkat Desa.

Berikut hasil wawancara peneliti kepada Kepala Desa Compang Kules yaitu Bapak Fransiskus Romulus mengenai bagaimana partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan musrembang Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu sebagai berikut:

“untuk perencanaan di Compang Kules sudah sesuai dan sudah kita jalankan pembangunan sesuai dengan apa yang direncanakan, tapi ada sedikit hambatan yang terjadi ketika dalam pembangunan tidak sesuai dengan waktu,tempo,hasil,dll, itu partisipasi masyarakat dalam proses musrembang yang dilakukan itu masi rendah terkadang mereka hanya sebatas hadir saja tapi tidak memberikan pendapat pada saat musrembang”

Penuturan Didukung oleh Bapak Mikael Dandut selaku Ketua BPD Desa Compang Kules:

“ Dalam proses musrembang yang dilakukan, masyarakat cukup antusias untuk menghadiri musrembang tapi kendala dalam proses musrembang itu sendiri adalah masyarakat kurang mampu mengeluarkan pendapat didepan umum” . (wawancara 23 Juni 20213).

Berdasarkan pada hasil MusrembangDesa, Pemerintah Desa harus membuat RKPDesa yang memuat tentang Rencana Penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Desa karena RKPDesa merupakan Penjabaran Dari RPJMDes. Berikut ini hasil wawancara Desa Compang Kules yaitu Bapak Bonefantura Madu selaku Bendahara Desa Compang Kules yaitu sebagai berikut:

“Desa Compang Kules, Pemerintah Desa membuat rancangan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. Dokumen RKPDes ini merupakan hasil usulan masyarakat desa melalui forum Musrenbangdes, sebagai wujud partisipatif masyarakat desa. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa kepada Kepala Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa sebagaimana dimaksud di atas, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Dokumen APBDDes yang sudah dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Desa Compang Kules bersama BPD Compang Kules, disosialisasikan kepada masyarakat. Tujuan dari sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Compang Kules, merupakan bentuk dari transparan keuangan desa kepada masyarakat Desa Compang Kules. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa yang telah disepakati bersama dan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati Manggarai Barat melalui Camat Kuwus Barat paling lambat 3 (tiga) hari sejak

disepakati untuk dievaluasi.” (Bendahara Desa, 24 Juni 2023.)

V. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Compang Kules Kecamatan Kuwus Barat Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2022 maka secara garis besar dapat disimpulkan bahwa:

Proses Akuntabilitas Pengelolaan ADD meliputi Akuntabilitas Perencanaan, Akuntabilitas Pelaksanaan, Akuntabilitas Pengawasan dan Pertanggungjawaban

a. Akuntabilitas Perencanaan

Pada tahap Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Compang Kules Kecamatan Kuwus Barat Kabupaten Manggarai Barat, Pemerintah desa melakukan Transparansi dan kepala desa juga melakukan musyawarah terlebih dahulu kepada masyarakat, akan tetapi pada saat musrembangdes dilakukan masyarakat kurang mampu mengeluarkan pendapat didepan umum sehingga pemerintah mempunyai kendala dalam menentukan program yng ingin di jalankan.

b. Akuntabilitas Pelaksanaan

Pada tahap Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, di Desa Compang Kules, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) menurut regulasi tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/ jasa diterima. Akan tetapi, di Desa Compang Kules Kecamatan Kuwus Barat Kabupaten Manggarai Barat surat Permintaan Pembayaran bisa dilakukan sebelum barang dan/ jasa diterima (SPP Panjar). Pada saat melakukan verifikasi dokumen-dokumen yang ada tidak lengkap. Sehingga kelengkapan dokumen yang suda dibuat dalam pelaksanaan tahun 2022 baru buku kas pembantu kegiatan dan kwitansi. Ketidak sesuaian ini juga menunjukkan masi minimnyapengetahuan SDM dalam tata cara Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

c. Akuntabilitas Pengawasan

Pada tahap pengawasan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Compang Kules sudah sesuai dengan prosedur yang dimana sudah diatur dalam perbup no 08 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa.

d. Pertanggungjawaban

Dalam tahap Peranggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Compang Kules Kecamatan Kuwus Barat Kabupaten Manggarai Barat, Belum Sesuai dengan regulasi karena laporan pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDes tidak dilampirkan bukti yang lengkap. Saat melakukan verifikasi kelengkapan dokumen-dokumen yang ada, dimana ditemukan bahwa pada tahun 2022 hanya mencantumkan laporan realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan dan format Laporan Program Pemerintah Daerah yang masuk ke desa sedangkan laporan kekayaan milik desa itu tidak dicantumkan.

Saran

Dari kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk Desa Compang Kules Kecamatan Kuwus Barat Kabupaten Manggarai Barat dalam hal pengelolaan alokasi dana desa antara lain:

- 1 Pemerintah Desa Compang Kules diharapkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan harus memenuhi regulasi yang sudah ditetapkan
- 2 Pemerintahan desa Compang Kules diharapkan setiap laporan Peranggungjawaban realisasi APBDes dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam permendagri.
- 3 Aparat Desa Compang Kules, Masyarakat dan Seluruh pihak yang terkait disarankan dapat bekerjasama dalam pengelolaan ADD di Desa Compang Kules.

Beberapa upaya yang perlu dilakukan yakni dalam Proses penggunaan Anggaran sebaiknya Pemerintah Desa melakukan survey terlebih dahulu sehingga Pembangunan yang Pemerintah laksanakan tepat Sasaran. Selain itu, Pembinaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan kepada aparat Desa perlu ditingkatkan Semua kutipan dan rujukan yang digunakan oleh penulis harus disajikan dalam bagian ini konsisten dengan tulisan, gambar atau tabel yang dikutip.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainul siti. (2016). "akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa kecamatan rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Dipetik September tahun 2019". Dalam kembali dari <http://repository.unej.ac.id>.
- Ainurrohma Puteri. (2015). "Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di kecamatan panarukan kabupaten situbondo tahun 2014". Skripsi jurusan akuntansi Universitas Jember.
- Apriliani. (2014). "Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa di desa Kedungharjo kecamatan muncar Kabupaten Banyuwangi tahun 2013." Dambil kembali dari <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/61025>.
- Ariyanti Nur. (2014). "Efektivitas kelembagaan desa dalam praktik demokrasi di desa Kalangdepok, Pemalang, Jawa tengah. Jurnal Sosiologi Pedesaan, Vol 02, No 3".
- Asmara, J.A. (2010). "Analisis Perubahan Alokasi Belanja Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nanggro Aceh Darussalam".
- Desi Purnamasari. (2016). "Analisis Pengelolaan Alokasi dana desa(ADD) di kecamatan Jabon Kabupaten sidoarjo tahun 2015."
- Dura Justita. (2016). "Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat." Jurnal Jibeka Vol 01 No 1 Agustus 2016.
- Efendi Loli, Darwanis, dan Syukry Abdullah. 2017. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah”. *Jurnal Prespektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 3, No. 2, ISSN 2502-6976.

Erni Tahir. (2018) Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi kasus pada desa Jaya Makmur, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi).

Frediyanto, A..(2015). "Akuntabilitas Alokasi Dana Desa tahun2014 dalam mewujudkan good governance goverment (studi kasus pada desa bulurejo kecamatan benjeng kabupaten gresik)". skripsi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas wijaya putra.

Girsang, H. A. (2015). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Indrawati Rina. S. (2017). "Pengaruh akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa , Kebijakan Desa, Kelembagaan Desa terhadap kesejahteraan masyarakat". *E-JRA Vol 07 No 02 Agustus 2018*.

Ismail Muhammad, Ari Kuncara Widagdo, dan Agus Widodo. 2016. "Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa". Surakarta: Universitas Sebelas Maret, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 19, No.2, ISSN 1979-6471.

Kalimandhanu. 2014. "Studi Tentang Pengelolaan Alokasi Dana di Desa Perangkat Selatan Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara". *Journal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No.2, ISSN 2008-2022.

Kurniawati Yuli. (2017). "Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat". *Jurnal Akuntansi vol. 12 No. 2 November 2017* .

Mahfudz. (2009). "Analisis Dampak lokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa Universitas Diponegoro Semarang".

Mardiasmo. (2002). "Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah dan Pengelolaan Dana dengan Prinsip Value for Money, Edisi ke 5 Tahun 2002".

Michael Mann. (1984). "The International Encyclopedia of Sociology. Vol 172 .

Muslimin. (2012). "Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa punagaya kecamatan bagkala Kabupaten Janeponto". Diambil kembali dari jurnal.unismuh.ac.id/index.php/otoritas/articel.

Nafidah. (2017). "Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat". *Jurnal Akuntansi vol. 12 No. 2 November 2017* .

Nasihatun Lina.N. (2015). "Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa Dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Jurnal Bisnis dan Manajemen". Vol 03 No 01 Juni 2015.

- Rohmatin, N. (2015). "Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa Dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Jurnal Bisnis dan Manajemen". Vol 03 No 01 Juni 2015.
- Purwanto, N. (2005). Psikologi Pendidikan Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Rahmi Fajri, E. S. (2016). "Akuntabilitas pemerintah desa Pada pengelolaan alokasi dana desa (ADD) studi pada kantor desa ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang". diambil kembali dari <https://media.neliti.com/media/publication/82164-id-akuntabilitaspemerintah-desa-pada-penge.pdf>.
- Risti Valentina Huri. (2015). "Akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan dana desa dalam proses pembangunan di desa dasri Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi." Dambil kembali dari <http://repository.unej.ac.id>.
- Risya Umami, I. N. (2017). "Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan alokasi dana desa". ISSN 20886969 VOL. 6 EDISI 1, OKTOBER 2017.
- Riyani, N. (2016). Analisis Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Akuntansi Publik.
- Setiawan, (2012). Pengaruh Harga dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian Ramayana. Vol 14.No 12.
- Sugiyono .(2016).Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (mixed methodes). Bandung; Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna. (2015). Akuntansi Desa-PandunTata Kelola Keuangan Desa. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sukanto. (2014). "Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, di Bangka Belitung.. "JurnalAkuntansi 2017 .
- Wardana. (2015).Perumusan Rancangan Keuanga, pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan, melakukan evaluasi atas kinerja, pelaksanaan pelaporan keuangan.